



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018

Jakarta, 05/11/2018 Kemenkeu – Penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2018 telah dilaksanakan pada hari Senin (5/11) di Istana Wakil Presiden. Kementerian Keuangan mendapat kualifikasi informatif dengan nilai 96,90 yang merupakan capaian terbaik diantara badan publik kementerian lain.

Pada tahun 2018, Komisi Informasi Pusat (KIP) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada 460 (empat ratus enam puluh) badan publik, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut, KIP mengkategorikan badan publik ke dalam 5 (lima) kualifikasi penilaian, yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

Monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik terdiri dari dua tahapan. Pertama, mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan terkait pengembangan *website*, pengumuman Informasi Publik, pelayanan Informasi Publik, dan penyediaan Informasi Publik. Selanjutnya, KIP melakukan verifikasi terhadap kesesuaian jawaban kuesioner dengan data dukung yang dicantumkan. Kedua, masing-masing Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/PPID badan publik melakukan presentasi di hadapan juri yang ditugaskan oleh KIP. Pada kesempatan tersebut, Kementerian Keuangan diwakili oleh Bapak Nufrensa Wira Sakti selaku PPID Kementerian Keuangan. Tahapan presentasi dilakukan untuk menilai komitmen, koordinasi, dan inovasi badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.

Hasil keseluruhan monitoring dan evaluasi terhadap 460 (empat ratus enam puluh) badan publik menunjukkan bahwa sebanyak 15 Badan Publik (3,26%) dengan kualifikasi Informatif, 36 Badan Publik (7,83%) dengan kualifikasi Menuju Informatif, 53 Badan Publik (11,52%) dengan kualifikasi Cukup Informatif, 53 Badan Publik (11,52%) dengan kualifikasi Kurang Informatif, dan 303 badan publik (65,87%) dengan kualifikasi Tidak Informatif. Hal ini mengisyaratkan masih perlu ditingkatkan upaya dari masing-masing badan publik untuk membudayakan keterbukaan informasi publik sebagai sarana mewujudkan terciptanya *good governance*. (fwu)

